

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviuh atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Asahan**



**Syahrul Efendi Tambunan, SH
Pembina Utama Muda**

NIP. 19691120 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang _____	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja _____	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah _____	4
D. Landasan Hukum _____	5
E. Sistematika _____	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis _____	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 _____	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 _____	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi _____	27
B. Realisasi Anggaran _____	32
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya _____	35
BAB IV PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan... diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

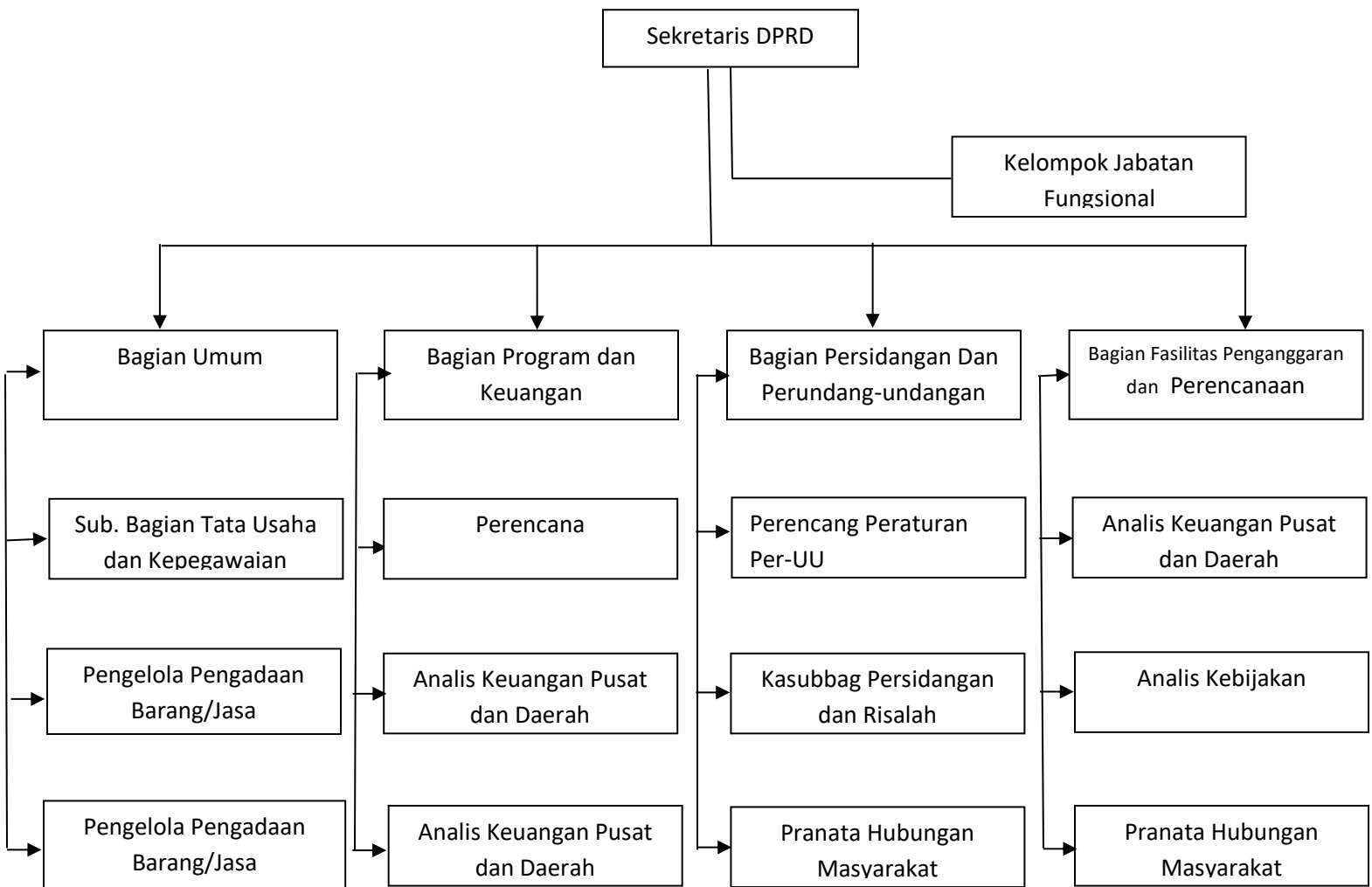
Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan No.5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas: Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD
2. Perumusan kebijakan Teknis Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
3. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

4. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
5. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
6. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Sekretariat DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Sekretaris DPRD sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Kepala Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan



Struktur Organisasi

A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (Pengawasan legislasi dan Budgeter)
2. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3. Peningkatan dukungan anggaran sarana dan prasarana kantor serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-pelatihan
4. Ketersediaan ruangan publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat.
5. Mengoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan periode 2025 - 2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut

1. Mewujudkan pelayanan administrasi DPRD Kabupaten Asahan dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.
3. Meningkatkan produktivitas kerja DPRD Kabupaten Asahan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah daerah menetapkan berbagai Peraturan Daerah.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
6. Peraturan Bupati Asahan No.23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Kabupaten/Kota ... Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029; tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029 adalah:

Visi Kabupaten Asahan:

“Masyarakat Asahan Sejahtera Yang Religius, Maju dan Berkelanjutan”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel.
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan mengacu pada Misi Keempat, yaitu :

“Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2025 - 2029 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Desa	1. Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100
			Indeks Pelayanan Publik	78	79	80	81	82	82

Sumber : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan periode 2025 - 2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Desa	1.1.	Indeks Pelayanan Publik	Persen	Kemudahan akses informasi tentang pelayan publik	Formulasi dihitung oleh PAN-RB	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
		2.1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	Kemampuan Sekretariat DPRD dalam memberikan Pelayanan yang berkualitas	Jumlah Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD di kali 100 persen	Sekretariat DPRD Kab.Asahan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Desa	1. Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Palayanan Publik	Persen	100
			Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-20230, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 10 Januari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Desa	1	Indeks Palayanan Publik	Persen	100%
		2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan :

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.000
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
		Jumlah Dokumen DPA-SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	89.999.750

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	27.382.981.062
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	40.000.000
	Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.000.000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	73.928.110
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	158.390.250
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	133.056.158
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	517.065.000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	97.064.700
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	95.540.000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,988,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	1 Laporan	636,830.864
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	67.710.000

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1,716.117.550
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	450.996.000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	86.930.000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	45 stell	503.676.000
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	135,000,000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	693.948.250
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	119.034.450
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	256.018.200
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	155.800.400
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	117.168.950
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	118.356.000
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	130.063.350
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	104.243.175

	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	45.005.800
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	157.969.800
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	28.997.500
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	50.997.500
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	109.497.250
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	2,064.999.950
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	261.299.457
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	25 Orang	69.999.675
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	491.467.742
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	59,999,850
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	92,023,550
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	3.689.569.000
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	213.358.000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	11.886.046.000

		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	108.274.450
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	99.999.900

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 1 November Tahun 2025 telah dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam Strategis yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Kabupaten Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Desa	1 Indeks Palayanan Publik	Persen	100%
		2 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	59,730,500
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	34,730,500.
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39,220,500
		Jumlah Dokumen DPA-SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	39,220,500
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	39,220,500
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	151,080,700
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	27,490,983,162

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	72,631,050
	Jumlah Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	39,800,000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	65,678,110
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	210,503,875
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	158,081,988
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	517.065.000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	120,789,550
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1,342,943,800
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,988,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	1 Laporan	636,848,121
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	53,590,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1,872,110,475
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	476,935,300

		Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180,964,000
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan		545,376,000.
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		135,000,000
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	667,556.550
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	116,437,850
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	252,353,350
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	154,714,250
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	115,053,600
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	111,804,050
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	139,336,450
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	133,082,675
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	25,466,800

	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	97,226,750
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	28,805,000.
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	103,962,500
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	99,497,250
	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	1 Dokumen	2,634,767,450
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	251,148,325.
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	69,606,625
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	25 Orang	456,087,242
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	59,999,850
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	92,023,550
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3,721,907,550
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	228,211,882.00
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	20,141,082,550
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	105,139,750
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan	1 Laporan	97,882,150

		Kinerja DPRD yang Disusun		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	59,730,500

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 - 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas tata kelola	Indeks Palayanan Publik	100	78	78	Tinggi	Sekretariat DPRD

	Pemerintah dan Desa	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
--	------------------------	---	-----	-----	-----	------------------	---------------------

Uraian penjelasan tabel :

1. Indikator Indeksi Pelayanan Publik yang digunakan untuk mengukur kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
2. Indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sudah cukup puas dengan cara Sekretariat mampu melaksanakan tugas-tugas tepat waktu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.3

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	59.730.500,00	35.100.850,00	58,77	41,23
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	34.730.500,00	31.086.750,00	89,51	10,49
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.220.500,00	25.539.800,00	65,12	34,88
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.220.500,00	25.405.250,00	64,78	35,22
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.220.500,00	26.131.650,00	66,63	33,37
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	151.080.700,00	130.596.400,00	86,44	13,56
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	100%	27.490.983.162,00	26.524.785.037,00	96,49	3,51
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	72.631.050,00	42.599.900,00	58,65	41,35

1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	39.800.000,00	39.640.000,00	99,60	0,4
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.3.1	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	65.678.110,00	40.950.150,00	62,35	37,65
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	210.503.875,00	209.001.375,00	99,29	0,71
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100%	158.081.988,00	156.628.718,00	99,08	0,92
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	517.065.000,00	423.346.800,00	81,87	18,13
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	120.789.550,00	119.795.650,00	99,18	0,82
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	1.342.943.800,00	1.320.735.987,00	98,35	1,65
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	13.988.000,00	13.910.000,00	99,44	0,56
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	636.848.121,00	470.572.219,00	79,89	26,11
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	53.590.000,00	43.493.000,00	81,16	18,84
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.872.110.475,00	1.757.159.358,00	93,86	6,14
1.6	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	1 Unit	100%	476.935.300,00	445.570.915,00	93,42	6,58
1.6.2	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	180.964.000,00	167.204.650,00	92,40	7,6
1.7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
1.7.1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100%	545.376.000,00	496.542.161,00	91,05	8,95
1.7.2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100%	135.000.000,00	43.346.944,00	32,11	67,89
1.8	Layanan Administrasi DPRD							
1.8.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%	679.076.400,00	479.134.900,00	70,56	29,44

2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
2.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD							
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	116.437.850,00	115.912.750,00	99,55	0,45
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	252.353.350,00	251.190.350,00	99,54	0,46
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	154.714.250,00	153.083.250,00	98,95	1,05
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran							
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	115.053.600,00	83.968.600,00	72,98	27,02
2.2.2	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	111.804.050,00	60.490.100,00	54,10	45,9
2.2.3	Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	139.336.450,00	136.417.050,00	97,90	2,1
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	133.082.675,00	97.556.675,00	73,31	26,69
2.2.5	Pembahasan Laporan Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	25.466.800,00	23.806.800,00	93,48	6,52
2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	97.226.750,00	94.276.750,00	96,97	3,03
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
2.3.1	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	28.805.000,00	22.720.000,00	78,88	21,12
2.3.2	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	103.962.500,00	97.293.500,00	93,59	6,41
2.3.3	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	99.497.250,00	99.458.250,00	99,96	0,04
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD							
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.634.767.450,00	1.455.448.750,00	55,24	44,76
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	251.148.325,00	189.632.275,00	75,51	24,49
2.4.3	Penyediaan Kelompok Fakar dan Tim Ahli	25 Orang	25 Orang	100%	69.606.625,00	69.359.625,00	99,65	0,35
2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	456.087.242,00	252.809.092,00	55,43	44,57
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	59.999.850,00	25.974.850,00	43,29	56,71
2.5.2	Penyusunan Pokok-pokok Fikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	92.023.550,00	60.010.150,00	65,21	34,79
2.5.3	Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.721.907.550,00	3.601.893.800,00	96,78	3,22
2.6	Pembahasan Kerjasama Daerah							
2.6.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	228.211.882,00	207.119.890,00	90,76	9,24

2.7	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.141.082.550,00	19.286.188.646,00	95,76	4,24
2.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%	105.139.750,00	41.017.250,00	39,01	60,99
2.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	97.882.150,00	97.114.150,00	99,22	0,78

Uraian penjelasan tabel :

Capaian Indikator kinerja rata-rata 100 persen sedangkan capaian rata-rata realisasi 92,80 persen dengan tingkat efisiensi 7,2 persen

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.730.500,00	35.100.850,00	41,23
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.730.500,00	31.086.750,00	10,49
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.220.500,00	25.539.800,00	34,88
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.220.500,00	25.405.250,00	35,22
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	39.220.500,00	26.131.650,00	33,37

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151.080.700,00	130.596.400,00	13,56
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.490.983.162,00	26.524.785.037,00	3,51
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.631.050,00	42.599.900,00	41,35
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	39.800.000,00	39.640.000,00	0,4
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.3.1	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	65.678.110,00	40.950.150,00	37,65
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.503.875,00	209.001.375,00	0,71
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	158.081.988,00	156.628.718,00	0,92
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	517.065.000,00	423.346.800,00	18,13
1.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.789.550,00	119.795.650,00	0,82
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.342.943.800,00	1.320.735.987,00	1,65
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.988.000,00	13.910.000,00	0,56
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	636.848.121,00	470.572.219,00	26,11
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.590.000,00	43.493.000,00	18,84
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1.872.110.475,00	1.757.159.358,00	6,14
1.6	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	476.935.300,00	445.570.915,00	6,58
1.6.2	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.964.000,00	167.204.650,00	7,6
1.7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
1.7.1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	545.376.000,00	496.542.161,00	8,95
1.7.2	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	135.000.000,00	43.346.944,00	67,89
1.8	Layanan Administrasi DPRD			
1.8.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	679.076.400,00	479.134.900,00	29,44
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
2.1	Pembetulan Perda dan Peraturan DPRD			

2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	116.437.850,00	115.912.750,00	0,45
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	252.353.350,00	251.190.350,00	0,46
2.1.3	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	154.714.250,00	153.083.250,00	1,05
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
2.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	115.053.600,00	83.968.600,00	27,02
2.2.2	Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	111.804.050,00	60.490.100,00	45,9
2.2.3	Pembahasan APBD	139.336.450,00	136.417.050,00	2,1
2.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	133.082.675,00	97.556.675,00	26,69
2.2.5	Pembahasan Laporan Semester	25.466.800,00	23.806.800,00	6,52
2.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	97.226.750,00	94.276.750,00	3,03
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
2.3.1	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	28.805.000,00	22.720.000,00	21,12
2.3.2	Pengawasan Penggunaan Anggaran	103.962.500,00	97.293.500,00	6,41
2.3.3	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	99.497.250,00	99.458.250,00	0,04
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD			
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	2.634.767.450,00	1.455.448.750,00	44,76
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	251.148.325,00	189.632.275,00	24,49
2.4.3	Penyediaan Kelompok Fakar dan Tim Ahli	69.606.625,00	69.359.625,00	0,35
2.4.4	Penyusunan Program Kerja DPRD	456.087.242,00	252.809.092,00	44,57
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	59.999.850,00	25.974.850,00	56,71
2.5.2	Penyusunan Pokok-pokok Fikiran DPRD	92.023.550,00	60.010.150,00	34,79
2.5.3	Pelaksanaan Reses	3.721.907.550,00	3.601.893.800,00	3,22
2.6	Pembahasan Kerjasama Daerah			
2.6.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	228.211.882,00	207.119.890,00	9,24
2.7	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksaaan Tugas DPRD	20.141.082.550,00	19.286.188.646,00	4,24
2.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	105.139.750,00	41.017.250,00	60,99
2.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	97.882.150,00	97.114.150,00	0,78

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah dan Desa	Indeks Pelayanan Publik	78	78	64.211.165.480,00	59.591.021.017,00	92,80%	7,2 %
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	100				

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Ca paian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	59.730.500,00	35.100.850,00	58,77	41,23
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	34.730.500,00	31.086.750,00	89,51	10,49
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.220.500,00	25.539.800,00	65,12	34,88
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.220.500,00	25.405.250,00	64,78	35,22
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39.220.500,00	26.131.650,00	66,63	33,37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	151.080.700,00	130.596.400,00	86,44	13,56
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	100%	27.490.983.162,0 0	26.524.785.037, 00	96,49	3,51
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	72.631.050,00	42.599.900,00	58,65	41,35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	39.800.000,00	39.640.000,00	99,60	0,4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	65.678.110,00	40.950.150,00	62,35	37,65
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	210.503.875,00	209.001.375,00	99,29	0,71
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100%	158.081.988,00	156.628.718,00	99,08	0,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	517.065.000,00	423.346.800,00	81,87	18,13
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	120.789.550,00	119.795.650,00	99,18	0,82

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	1.342.943.800,00	1.320.735.987,00	98,35	1,65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	13.988.000,00	13.910.000,00	99,44	0,56
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	636.848.121,00	470.572.219,00	79,89	26,11
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	53.590.000,00	43.493.000,00	81,16	18,84
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.872.110.475,00	1.757.159.358,00	93,86	6,14
Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	1 Unit	100%	476.935.300,00	445.570.915,00	93,42	6,58
Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	180.964.000,00	167.204.650,00	92,40	7,6
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100%	545.376.000,00	496.542.161,00	91,05	8,95
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 Tahun	1 Tahun	100%	135.000.000,00	43.346.944,00	32,11	67,89
Layanan Administrasi DPRD							
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%	679.076.400,00	479.134.900,00	70,56	29,44
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD							
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	116.437.850,00	115.912.750,00	99,55	0,45
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	252.353.350,00	251.190.350,00	99,54	0,46
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	154.714.250,00	153.083.250,00	98,95	1,05
Pembahasan Kebijakan Anggaran							
Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	115.053.600,00	83.968.600,00	72,98	27,02
Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	111.804.050,00	60.490.100,00	54,10	45,9

Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	139.336.450,00	136.417.050,00	97,90	2,1
Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	133.082.675,00	97.556.675,00	73,31	26,69
Pembahasan Laporan Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	25.466.800,00	23.806.800,00	93,48	6,52
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	97.226.750,00	94.276.750,00	96,97	3,03
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
Pengawasan Tindakan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	28.805.000,00	22.720.000,00	78,88	21,12
Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	103.962.500,00	97.293.500,00	93,59	6,41
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	99.497.250,00	99.458.250,00	99,96	0,04
Peningkatan Kapasitas DPRD							
Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2.634.767.450,00	1.455.448.750,00	55,24	44,76
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	251.148.325,00	189.632.275,00	75,51	24,49
Penyediaan Kelompok Fakar dan Tim Ahli	25 Orang	25 Orang	100%	69.606.625,00	69.359.625,00	99,65	0,35
Penyusunan Program Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	456.087.242,00	252.809.092,00	55,43	44,57
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	59.999.850,00	25.974.850,00	43,29	56,71
Penyusunan Pokok-pokok Fikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	92.023.550,00	60.010.150,00	65,21	34,79
Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3.721.907.550,00	3.601.893.800,00	96,78	3,22
Pembahasan Kerjasama Daerah							
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	228.211.882,00	207.119.890,00	90,76	9,24
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksaaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.141.082.550,00	19.286.188.646,00	95,76	4,24
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1 Laporan	1 Laporan	100%	105.139.750,00	41.017.250,00	39,01	60,99
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	97.882.150,00	97.114.150,00	99,22	0,78

Uraian penjelasan tabel :

Capaian Indikator rata-rata 100% sedangkan capaian Anggaran rata-rata 92,80 % efisiensi 7,2%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupate Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 64.211.165.480,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 59.591.021.017,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 serapan anggaran sebesar 92,80% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,2%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Asahan**

Sekretaris,



***Syahrul Efendi Tambunan, SH
Pembina Utama Muda**

NIP. 19691120 199703 1 003